

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2005. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: FH UI.
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1986. *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basrief Arief. 2006. *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Jakarta: Adika Remaja Indonesia.
- Chaerudin dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama,
- Eddy OS Hiariej. 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Efi Laila Kholis. 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Emerson Yuntho dkk. 2014. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch,
- Elwi Danil. 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Padang: PT Raja Grafindo Persada.
- Ermansyah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Bandung: Alumni.

- _____. 2013. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Marwan Effendy. 2007. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya Anti-korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya.
- _____. 2014. *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Muhammad Yusuf. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Paku Utama. 2013. *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Purwaning M Yanuar. 2007. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT Alumni.
- Ramelan, *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadia Group.
- Shinta Agustina. 2014. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themils.
- _____, dkk. 2015. *Obstruction of Justice*, Jakarta: Themils
- Sholehudin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Theodore S Greenberg dkk. 2009. *Stolen Asset Recovery: A Good Practice Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank.
- W.J.S. Poerwodiminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- W Riawan Tjandra. 2006. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Artikel/Jurnal

- Ario Wandatama dan Detania Sukarja. 2007, “Implementasi Instrumen NCB Asset Forfeiture di Indonesia untuk mendukung Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative.
- Bismar Nasution. 2007. “Stolen Asset Recovery Initiative dari Perspektif Hukum Ekonomi di Indonesia”
- Chitraning Whidhianindy. *Analisis Hukum Upaya Pengembalian Aset (Asset Recovery) Hasil Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: FHUI 2013).
- Eddy Milyadi Soepardi. “Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi”. Makalah disampaikan dalam ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor.
- Eka Iskandar, *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*
<https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-i/>
- _____, Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata, (Jawa Pos, 12 Agustus 2008).
- Emerson Yuntho dkk, 2014, Hasil Penelitian: *Studi atas Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- I.Gusti Ketut Ariawan, 2008, *Stolen Asset Recovery Initiative, Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset Negara*. Bali: Jurnal Kertha Patrika, Vol. 33 No. 01.

- I Ktut Sudiharsa, 2006, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Catatan Seminar Nasional “Sinergi Pemberantasan Korupsi: Peran PPATK Dan Tantangan Asset Recovery”, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, *Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia*, Jurnal Keadilan Vo. I. No. 2 Juni 2002.
- Ita Kurniasih, *Suatu Tinjauan Yuridis: Kerugian Negara Vs Kerugian Persero*, PPH Newsletter pada edisi No. 66 tahun 2006.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi. *Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)*
- Mujahid A. Latief, *Pengembalian Aset Korupsi via Instrumen Perdata*, (Jawa Pos, 1 Agustus 2007)
- O.S Hiariej, 2013, *Pengembalian Aset Kejahatan*, Jurnal Upinio Juris Vol. 13 Mei-Agustus 2013
- Suhadibroto, 2005, *Instrumen Perdata untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Korupsi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime: UN Guide For-Anti Corruption Policies*, https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/UN_Guide.pdf (November, 2003)
- United Nations Office on Drugs and Crime. Compendium of International Legal Instruments On Corruption, Second Edition*, United Nations, New York 2005.
- Yunus Husein, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (Asset Forfeiture Of Crime In Indonesia)*, jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7410563576

Internet

<http://acch.kpk.go.id/jejak-kasus/-/jejak-kasus/viewdetails/250> diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 11.40 AM.

<http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/kejagung-verifikasi-aset-yayasan-supersemar/> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 06.34 PM.

<http://news.okezone.com/read/2014/11/17/337/1066850/ini-total-aset-gayus-yang-disita-kejagung> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 09.30 PM.

<https://www.transparency.org/cpi2014/results> diakses pada tanggal 25 April 2015, pukul 05.35 pm.

<http://www.antaranews.com/berita/511831/putusan-pk-atas-yayasan-supersemar-mengikat> diakses pada tanggal 15 Oktober 2015 pukul 08.58 PM.

Hukuman Koruptor di Indonesia Dinilai Masih Ringan”,

<http://nasional.sindonews.com/read/1072386/13/hukuman-koruptor-di-indonesia-dinilai-masih-ringan-1451117373> diakses pada tanggal 28 Desember 2015 pukul 09.05 WIB.

<https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html>

A. Djoko Sumaryanto, *Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam tindak Pidana Korupsi*,

<http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html> diakses pada tanggal 25 Desember 2015 pukul 20.24 WIB

Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama*

Internasional, <http://www.saldiisra.web.id/> diakses pada tanggal 15 September 2015 Pukul 10.05 WIB.

<https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19370083/201501010000/311.0.pdf> diakses pada tanggal 26 Desember 2015 Pukul 13.31 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonomi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006.

Dokumen Internasional

United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003) atau
Konvensi PBB Anti Korupsi 2003

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)
atau Konvensi Kejahatan Transnasional Terorganisasi pada tahun 2000.

